

“ANTARA TIMUR DAN BARAT”: MEREFLEKSIKAN PENDIDIKAN KARAKTER INDONESIA MELALUI PEMIKIRAN SUTAN TAKDIR ALISJAHBANA

Fadly Rahman

Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang No.KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
E-mail: fadly.rahman@unpad.ac.id

Naskah Masuk: 11-02-2020

Revisi akhir: 12-05-2020

Disetujui terbit: 15-05-2020

“BETWEEN EAST AND WEST” REFLECTING INDONESIA’S CHARACTER EDUCATION THROUGH THE THOUGHT OF SUTAN TAKDIR ALISJAHBANA

Abstract

The arguing issues of Eastern and Western civilizations as performed by Edward Said with his Orientalism and Hassan Hanafi with his Occidentalism are still interesting to discuss today. Not only in the countries of the former Western/European colonies, but the problem also occurs in Western countries themselves. A different condition happens. People in Western countries see that Eastern traditions are manifestation of relieving the community’s fatigue towards various practices of modernity, whereas those in Eastern ones try to continue absorb the Western modernity as something valuable and try to keep it for their life. This article discusses this issue within Indonesian atmosphere. By discussing and reflecting on the thought related to the “cultural polemic” which was initiated by Sutan Takdir Alisjahbana in 1935, this paper tries to trace the issues of conflict between the East and West in Indonesia as a matter which is now forgotten in the efforts to build national character education.

Key words: *character education, culture, Indonesia, Cultural Polemic*

Abstrak

Persoalan seputar benturan peradaban Timur dan Barat sebagaimana dicetuskan oleh Edward Said dengan *Orientalisme*-nya dan Hassan Hanafi dengan *Oksidentalisme*-nya masih menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan saat ini. Bukan hanya terjadi di negara-negara bekas jajahan Barat/Eropa, persoalan itu juga terjadi di negara-negara Barat sendiri. Bedanya, jika di negara-negara Barat, tradisi Timur dilihat sebagai wujud dari pelepasan rasa penat masyarakatnya terhadap berbagai praktik modernitas, maka sebaliknya di negara-negara Timur masyarakatnya justru terus mencoba terbuka menyerap modernitas Barat dan pada saat bersamaan berupaya mempertahankan nilai-nilai tradisinya. Artikel ini mencoba membahas persoalan tersebut dalam ruang lingkup Indonesia. Dengan membahas dan merefleksikan pemikiran terkait “polemik kebudayaan” yang pernah dipantik oleh Sutan Takdir Alisjahbana pada 1935, tulisan ini mencoba untuk meretas masalah benturan antara Timur dan Barat di Indonesia sebagai suatu hal yang kini terlupakan dalam upaya membangun pendidikan karakter bangsa.

Kata kunci: *pendidikan karakter, budaya, Indonesia, Polemik Kebudayaan*

I. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara-bangsa, Indonesia dikenal kaya memiliki keragaman budaya. Berbagai daerah dan suku bangsa di setiap provinsi memiliki identitas budayanya tersendiri. Semua itu, hingga kini, acap dianggap sebagai sebuah berkah dan penanda bahwa sebagai sebuah bangsa, Indonesia sungguh kaya akan budaya. Sejak awal kemerdekaan, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pun diusung sebagai simbol perengkuh persatuan dalam keragaman. Namun, alih-alih bangsa dengan hal itu, ternyata, keragaman itu ibarat duri dalam daging. Nyatanya, di balik keragaman itu bersekam perbedaan (adat, kebiasaan, hingga agama) antarmasyarakat dan suku-bangsa yang kapan saja dan sewaktu-waktu berpotensi meletup menjadi konflik horizontal.

Selain itu, hal-hal yang identik dengan pencitraan bahwa budaya Indonesia eksotik dan ramah nyatanya di balik itu menyekam nilai-nilai negatif. Mochtar Lubis dalam bukunya *Manusia Indonesia*¹ menyebut beberapa nilai negatif itu yang di antaranya meliputi: munafik, segan dan enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhyul, artistik, serta berkarakter lemah. Lalu, apakah semua itu masih melekat dan akan selalu menubuh dalam kehidupan budaya dan mental bangsa Indonesia?

Ternyata, pada masa sebelum Indonesia merdeka, pemikiran seputar masalah kebudayaan Indonesia telah berlangsung penuh polemik. Polemik itu berlangsung sengit pada dasawarsa 1930-an di media *Pujangga Baru*, *Suara Umum*, *Perwarta Deli*, dan *Wasita* yang mengetengahkan pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana (1908 – 1994, selanjutnya ditulis STA) dengan para penanggapnya, yaitu Adinegoro, M. Amir, Ki Hajar Dewantara, Poerbatjaraka, Sanusi Pane, Sutomo, dan Tjindarbumi. Pangkal persoalannya adalah tulisan STA di *Pujangga Baru* tahun 1935 berjudul “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru”

yang dinilai oleh sebagian penanggapnya terlalu kebarat-baratan dalam menghendaki pembaharuan budaya bangsa Indonesia menjadi lebih maju.² Benturan pemikiran antara nilai-nilai Barat (yang diusung kolonialisme Eropa) dan Timur (Pribumi) memang menjadi isu yang sensitif pada masa itu.

Benturan antara Timur dan Barat yang terpancar dari polemik pemikiran STA dengan para penanggapnya pada 1930-an seakan mencerminkan telah menggejalanya fenomena “*global paradox*” sebagaimana dipikirkan John Naisbitt.³ Naisbitt menganjurkan bahwa pada alam modern, sedianya manusia berpikir secara lokal, tetapi bertindak secara global. Menurutnya, hanya dengan cara berpikir demikian, nilai-nilai kelokalan suatu bangsa bisa terjaga dari pengaruh global yang cenderung lekat dengan nilai-nilai modernitas dari Barat. Negara-bangsa seperti Jepang dan Korea Selatan dapat dikatakan merupakan cerminan dari *global paradox*. Meski maju dengan industri dan teknologi modernnya, kedua negara-bangsa dari Asia Timur itu tetap mampu mempertahankan nilai-nilai budaya lokal berupa kebiasaan, adat-istiadat, dan bahasanya tanpa terhegemoni oleh berbagai pengaruh nilai dari Barat. Akan tetapi pada sisi lain, mereka pun tetap mampu untuk terbuka dalam beradaptasi dengan modernitas Barat.

Apakah kasus strategi kebudayaan seperti di Jepang dan Korea Selatan itu merupakan model yang sebenarnya dipikirkan dan diinginkan oleh STA serta ideal diterapkan untuk mentalitas kebudayaan di Indonesia? Jawaban atas hal itu tidaklah sederhana, karena untuk menjawabnya harus menyelami terlebih dahulu pemikiran budaya dari STA secara mendalam disertai dengan berbagai pembuktian.

Untuk masa tahun 1930-an, pemikiran STA dinilai sangat kontroversial oleh beberapa penanggapnya. Pasalnya, pemikiran “kebarat-baratan” STA berhadapan dengan kalangan yang masih berpagut

1 Buku ini pada mulanya adalah pidato kebudayaan Mochtar Lubis (1977) di Taman Ismail Marzuki. Sikap Lubis begitu lugas dalam mengupas sifat-sifat negatif orang Indonesia, sehingga menjadikan buku ini menimbulkan pro dan kontra, selain membangkitkan pemikiran kritis tentang jati diri manusia Indonesia. Lebih lanjut dapat merujuk Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Obor, 2012).

2 Sutan Takdir Alisjahbana, “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru”, dalam Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1977), hlm. 13 – 21).

3 John Naisbitt, *The Global Paradox*, (New York: Warner Books, 1994).

pada nilai-nilai tradisi lama (feodal) serta kalangan yang bersandar pada nilai-nilai agama (dogmatis). Sebagian kecil pihak mendukung STA, tapi sebagian besar menghujatnya. Sebenarnya ia hanya menawarkan alternatif suatu strategi kebudayaan bagi rakyat Indonesia yang kian menyadari rasa kebangsaannya. Apa yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah memeriksa kembali motif dan makna ajakan STA agar “orang Timur harus berguru kepada orang Barat”. Dalam ajakannya itu juga, STA menyifati Barat dengan sebutan “*dynamisch*”, kebalikan dari Timur yang disifatnya dengan sebutan “*statisch*”.⁴

Jika menelaah karakter pemikiran STA, maka tersirat ini mewakili wacana orientalisme Edward Said⁵ dalam memahami konsepsi Timur sesuai dengan definisi yang didasarkan pada pengalaman manusia Barat/Eropa. Bertolak belakang dengan Said, Hassan Hanafi⁶ lebih menekankan perlunya reorientasi terhadap Barat melalui wacana oksidentalisme-nya—sebagai kritik atas orientalisme. Hanafi mendudukkan oksidentalisme dengan tujuan menghadapi westernisasi yang salah satunya dijalankan melalui proyek-proyek orientalisme para sarjana Barat pada masa kolonial. Dalam pandangan Hanafi, pengaruh westernisasi terhadap budaya dan konsepsi Timur begitu luas. Pengaruhnya tidak hanya terhadap alam, melainkan ancaman terhadap identitas masyarakat Timur sebagaimana tampak dari kemerdekaan peradaban dan gaya hidup.⁷

Untuk menghindari relasi yang hegemonik Barat terhadap Timur, maka secara garis besar Hanafi mendorong perlunya paradigma yang berimbang dan netral dalam menjalin relasi antara *ego* (Timur) dengan *the other* (Barat)—kebalikan dari orientalisme yang memposisikan Timur sebagai “yang lain” (*the other*). Dengan kata lain, oksidentalisme sebagaimana dimaksudkan Hanafi bukanlah sikap saling membenturkan Timur dengan Barat, melainkan

relasi dialektis untuk saling mengisi dan melakukan kritik antar keduanya sehingga hegemonisasi Barat terhadap Timur dapat terhindarkan.

Apakah pandangan STA dalam memandang Timur merupakan sebetulnya keterjebakan pikirannya terhadap apa yang dikonsepsikan dan didefinisikan dalam proyek-proyek orientalisme Barat pada masa kolonial? Atau mungkin justru, di balik kesan kebarat-baratan yang dialamatkan oleh para kritikus, apa yang diinginkan STA lebih sebagai upayanya menjalin relasi Timur dan Barat dengan menghadirkan Timur selaku *ego* dan memposisikan Barat sebagai “yang lain”? Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, melalui artikel ini akan diwacanakan kembali pemikiran STA dalam polemik kebudayaannya dengan melihat bukti-bukti historis kebudayaan Indonesia yang masih relevan untuk dibahas namun banyak dilupakan dalam diskursus konstruksi pendidikan karakter bangsa.

Pewacanaan mengenai pendidikan karakter Indonesia salah satunya pernah diketengahkan dalam sebuah konferensi internasional di Yogyakarta pada 2017. Konferensi bertema “Character Education for 21st Century Global Citizens” ini membahas berbagai permasalahan dalam pendidikan karakter pada abad ke-21. Kasiyan⁸ selaku salah satu pembahas mempertanyakan secara menarik perihal hegemoni karakter Barat dalam buku-buku kesenian. Menurutnya, banyak gagasan pengetahuan dari para pemikir Barat—dibandingkan para pemikir bangsa sendiri—yang dijadikan rujukan dalam dunia pendidikan Indonesia namun tanpa disadari justru malah menghilangkan karakter ke-Indonesia-an itu sendiri. Kasiyan memetakan masalah esensial dari bias pengaruh Barat di Indonesia ini dalam dua hal, yaitu: substansi dan subyek. Dalam dunia pendidikan, Barat kerap dianggap sebagai substansi sekaligus subyek pengetahuan. Kesan hegemonik Barat ini sendiri telah terkonstruksi sejak masa kolonial dan pengaruhnya

4 Sutan Takdir Alisjahbana, *op.cit.*, hlm. 18 – 19.

5 Edward Said, *Orientalism*, (London: Penguin, 1977).

6 Hassan Hanafi, *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat*, terj. M. Najib Buchori, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 16 – 17.

7 *Ibid.*, hlm. 16 – 17.

8 Kasiyan, K, “Questioning Western Character Hegemony in Indonesian Aesthetics Books”, dalam Endah Retnowati et.al, *Character Education for 21st Century Global Citizens*, Proceedings of the 2nd International Conference on Teacher Education and Professional Development, (Universitas Negeri Yogyakarta, 21–22 Oktober 2017), hlm. 35 – 41.

tetap menjadi sindrom yang sulit dihilangkan pada masa poskolonial –misalnya tampak dari kesukaan berlebihan terhadap bahasa asing.⁹

Di tengah gencar dan pesatnya nilai-nilai modernitas yang banyak diadopsi dari Barat, bangsa Indonesia sejatinya memiliki kesiapan mental dan kekuatan karakter untuk menghadapinya. Kasiyan¹⁰ menyatakan diperlukan adanya sebuah kesadaran baru untuk menyingkirkan pengaruh hegemoni Barat berikut kolonisasi pengetahuannya. Kesadaran baru itu sesungguhnya sudah lama dipikirkan oleh STA dalam polemik kebudayaannya. Apa yang dipikirkan oleh STA adalah suatu wujud dari tantangan-tantangan seorang intelektual. Tantangan intelektual itu sendiri menurut Soedjatmoko¹¹ berupaya untuk memahami permasalahan-permasalahan masyarakatnya, mentransformasikan masyarakat ke arah yang ideal, melibatkan masyarakat dengan nilai-nilai baru untuk mengubah kondisi sosial, serta menerangi masyarakat meniti jalan menuju masa depannya. Maka itu, dalam tulisan ini pemikiran STA kiranya perlu dikaji untuk didudukkan kembali sebagai suatu refleksi atas pendidikan karakter kebangsaan seiring dengan perkembangan Indonesia dalam arus global.

II. MEMAHAMI PERMASALAHAN BUDAYA DI INDONESIA MELALUI PEMIKIRAN STA

Pokok masalah yang diangkat oleh STA dalam tulisannya “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru” memang akan membuat banyak orang Indonesia tidak sepatutnya atau menganggapnya tidak nasionalistis dan mungkin dianggap tidak memuliakan budaya bangsa sendiri. Dalam pemikirannya, ia menyinggung agar sedianya bangsa Indonesia menyadari bahwa proses terbentuknya konsep “Indonesia” sebagai

sebuah bangsa dan juga sebagai budaya tidaklah setua dengan masa *prae-Indonesia* (pra-Indonesia) sebagaimana dibayangkan oleh kebanyakan orang Indonesia.

Masa yang dimaksudkan STA itu adalah masa ketika “nama Indonesia” belum muncul secara geopolitik. Maka, jika disimpulkan, segala bentuk kejayaan kerajaan masa lalu seperti Sriwijaya, Mataram (Hindu dan Islam), dan Majapahit bukanlah bagian dari Indonesia sebagai sebuah bangsa. Begitu juga dengan sosok-sosok pejuang seperti Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Teuku Umar tidaklah berjuang mengatasnamakan Indonesia, karena saat itu bayangan tentang bangsa –apalagi negara– bernama “Indonesia” belumlah ada. Semua kejayaan kerajaan, para raja, dan para sosok pejuang itu tentu bersifat lokalistik atau kedaerahan belaka.¹²

Masalahnya, pemikiran STA harus menghadapi kenyataan ketika segelintir tokoh dengan mengatasnamakan “bangsa Indonesia” pun punya pemikiran untuk menemu-ciptakan sejarah dan budaya Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam fenomena poskolonial, negara-bangsa yang baru memperoleh kemerdekaannya, tentu membutuhkan atribut, simbol, dan ikon sebagai penanda kebanggaan dan martabat kebangsaannya. Maka dari itu, narasi sejarah yang *national-centric* sangatlah diperlukan kehadirannya. Untuk kasus di Indonesia, mitos-mitos itu misalnya tampak dari ikhtiar Muhammad Yamin dalam mengisi ruh kebangsaan Indonesia. Dalam buku *6000 Tahun Sang Merah Putih* (1951), Yamin misalnya mengklaim Merah dan Putih sebagai warna bendera Indonesia telah hidup di Tanah Air Indonesia sejak masa prasejarah. Lalu menurutnya, Bendera Merah Putih pernah dipakai pula pada umbul-umbul masa kerajaan Majapahit; bahkan kedua warna itu juga membudaya dalam tradisi *jenang abang putih* (bubur

9 Pandangan kritis mengenai gejala kesukaan berlebihan terhadap bahasa asing (xenoglosofilia) di kalangan publik Indonesia dapat merujuk Alif Danya Munsiy, *Bahasa Menunjukkan Bangsa*, (Jakarta: KPG, 2005).

10 Kasiyan, *op.cit.*, hlm. 39.

11 Soedjatmoko, “The Intellectual in Developing Nation”, dalam Soedjatmoko, *Menjadi Bangsa Terdidik Menurut Soedjatmoko*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 43 – 44.

12 Sutan Takdir Alisjahbana, *op.cit.*, hlm. 13 – 14. Pemikiran sejarah dari STA itu sendiri kurang lebihnya sejalan dengan pemikiran sejarawan seperti R. Moh. Ali, *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sedjarah Asia Tenggara*, (Jakarta: Bhratara, 1963); dan juga Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?! (Yogyakarta: Ombak, 2006)*.

merah dan bubur putih). Untuk lebih menambah spirit geopolitik Indonesia, ditekankan juga bahwa berdirinya Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang dahulu ada seperti Kutai, Sriwijaya, hingga Majapahit. Status Indonesia sebagai negara kepulauan sekarang juga merupakan warisan dari *Mitreka Satata*, konsep wilayah kekuasaan dan kesatuan geopolitik Majapahit.¹³

Bagi STA, pandangan Yamin itu jelas ahistoris dan tidak sehat untuk ditanamkan dalam kesadaran hidup berbangsa. Pasalnya cukup jelas, nama Indonesia secara ruang dan waktu tidaklah setua yang dibayangkan dan diklaim Yamin. Nama yang mendekati “Indonesia” sendiri baru mulai disebut-sebut pada paruh kedua abad ke-19 oleh para sarjana Eropa di antaranya George Samuel Windsor Earl (1850), James Richardson Logan (1863), dan Adolf Bastian (1884). Namun, semua sebutan itu ternyata lebih berkonotasi kultural dan bukan politik. Secara politik nama Indonesia sendiri baru muncul pada masa Pergerakan Nasional pada awal abad ke-20. Para aktivis pergerakan nasional mulai menggantikan nama “*Indische*” –yang sebelumnya dilabelkan oleh politik kolonialisme Belanda– dengan “Indonesia”. Setelah itu, mulai bermunculan berbagai organisasi dengan jiwa ke-Indonesia-an, seperti Perhimpunan Indonesia (1922), Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (1926), Partai Nasional Indonesia (1928), dan Indonesia Moeda (1930).

Maka itu, pandangan ahistoris Yamin dalam pemikiran STA dapat memengaruhi terbentuknya jiwa kebudayaan bangsa Indonesia yang mengarah ke sifat supranasionalis hingga etnonasionalis sempit (sauvisme dan jingoisme). Dalam hal ini, pemikiran STA mungkin sejalan dengan Tom Nairn¹⁴, bahwa nasionalisme adalah sebetulnya “penipuan diri yang dibutuhkan (*a necessary self-deception*). Nairn memandang bahwa nasionalisme mengandung berbagai modus di balik proses penciptaan dan pencitraan identitas ke-

bangsaan. Meski banyak dikesankan adiluhung bahkan suci, baginya nasionalisme bukan sesuatu yang kekal dan universal. Nasionalisme, imbuhnya, lebih berfungsi sebagai mitos. Ironis sekaligus unik, justru karena mitos itulah nasionalisme bekerja. Ketika mitos-mitos itu beroperasi, orang-orang justru merasa menemukan keselamatan di dalamnya. Ditekankan oleh Nairn, bahwa nasionalisme nyatanya memang lahir dari perkembangan kondisi historis – material suatu masyarakat.

Alih-alih berhasil menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai semangat kebangsaan, ternyata dibalik itu semua malah mengacaukan keharmonisan budaya yang pada masa lalu bersifat serumpun. Kesadaran akan arti hidup berbangsa telah membuat kabur batas-batas, misalnya antara budaya nasional dan lokal (daerah) atau budaya bangsa Indonesia dengan budaya bangsa lainnya. Dalam salah satu contohnya, STA menyinggung suatu keanehan jika gamelan dihubungkan dengan identitas budaya Indonesia.¹⁵ Jelas, alat musik yang identik dengan budaya daerah Jawa itu tidaklah bisa mewakili keseluruhan Indonesia. Pasalnya, setiap daerah pun memiliki keidentikkan alat musiknya masing-masing. Pandangan STA terkait gamelan kurang lebih identik dengan kasus aksi saling klaim antara Indonesia dan Malaysia terhadap angklung, alat musik bambu yang identik dengan kebudayaan Sunda itu. Ketika Malaysia mengklaim angklung sebagai alat musiknya, kontan pemerintah dibuat berang dengan aksi negara jiran itu. Maka, demi dan atas nama harga diri dan martabat bangsa, pemerintah pun segera memproses pematenan angklung ke UNESCO pada 2010 sebagai warisan budaya Indonesia. Alat musik yang sebelumnya disifati etnik menjadi bersifat nasional ketika persoalan kebudayaan menjadi terhubung dengan kepentingan nasional.¹⁶

Dalam kasus budaya semacam itu, maka terlihat betapa negara berperan sekali dalam menumbuhkan

13 Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, (Jakarta: Siguntang, 1951).

14 Tom Nairn, “The Maladies of Development” dalam Hutchinson & Smith (eds.), *Nationalism*. (Oxford: Oxford University Press, 1994).

15 Alisjahbana, *op.cit.*, hlm. 14.

16 Untuk lebih jauh terkait aksi saling klaim kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia dapat merujuk studi Marshall Clark, “The Politics of Heritage: Indonesia – Malaysia Cultural Contestations”, dalam *Indonesia and the Malay World* (vol. 41 no. 121, 2013).

rasa dan ikatan emosi kebangsaan melalui simbol-simbol budaya, seperti juga halnya bahasa, bendera, dan lagu kebangsaan. Simbol-simbol itu dijadikan sebagai sarana bagi seluruh warga negara untuk mengidentifikasi kebangsaan dirinya. Semua memiliki pemahaman yang sama terhadap simbol-simbol kebangsaan, sehingga memunculkan apa yang dikatakan oleh Benedict Anderson dengan “bayangan persaudaraan” (*brotherhood*) antarmereka. Segala kesuka-citaan hingga kemarahan bisa membuncah ketika harga diri dan martabat bangsanya melambung atau sebaliknya direndahkan oleh bangsa lain. Jika ini terjadi, perasaan sebagai sesama bangsa seakan mewujudkan bukan lagi sebagai bayangan, tapi sebagai kenyataan.¹⁷

Melalui contoh semacam itu, maka untuk sementara pemikiran STA dapat dikatakan cukup terbukti relevansinya untuk melihat bagaimana sifat-sifat kebangsaan dalam beberapa kasusnya malah memengaruhi perilaku budaya masyarakat bahkan hingga pemerintah menjadi begitu banal. Pada titik ini, pemikiran STA menjadi penting dipikirkan ulang, terutama terkait pewartannya dalam menghubungkan budaya dengan sejarah. Masalahnya, kecenderungan umum di Indonesia, budaya dan sejarah adalah dua unsur yang cenderung dianggap terpisah atau tidak ada hubungannya. Padahal, seperti dikatakan Chris Barker, budaya bukanlah entitas statis, tapi tercipta oleh praktik dan makna yang terus berubah dan bekerja pada berbagai tingkatan sosial.¹⁸

Sayangnya, tidak banyak yang menyadari sifat dinamis budaya dalam waktu (masa lalu, kini, dan akan datang) itu. Kesadaran menjadi Indonesia, seperti dipikirkan STA, artinya, memutuskan sambungan kebudayaan Jawa, Melayu, Sunda dan lain-lain dari masa *prae-Indonesia*. Bukti nyatanya dapat dilihat dari hubungan antara Indonesia dengan kebudayaan Melayu. Ketika pada masa sebelum munculnya “kesadaran nasional” tahun 1928 (baca: Sumpah Pemuda), konsep budaya (dan bahasa) Melayu adalah milik bersama antara Indonesia dan Malaysia; maka,

setelah itu, keadaannya menjadi berbeda. Malaysia akan mengaku bahwa dirinya adalah standar ideal dari kebudayaan Melayu. Adapun bangsa Indonesia (pengecualian di kawasan Sumatra dan Kalimantan), merasa bahwa dirinya bukanlah bagian dari kebudayaan Melayu.

Tidak banyak yang menyadari bahwa hal itu telah memecah keserumpunan budaya yang dahulu pernah terjalin bersama di kawasan Melayu bahkan Asia Tenggara. Keterjalinan itu misalnya dapat dirasakan dari sejarah budaya bambu di Asia Tenggara sebagaimana diteliti oleh Jacqueline M. Piper. Di Asia Tenggara, bambu begitu memenuhi keperluan hayat masyarakatnya, mulai dari ayunan hingga peti mati, makanan, rumah, perkakas, dan hiburan.¹⁹ Menurutnya, dalam hal alat musik bambu, dapat dikatakan bahwa di Asia Tenggara ciri dan bentuknya sebenarnya memiliki hampir kesamaan. Angklung – selain sekian jenis alat musik bambu seperti calung, suling, celempung – juga memiliki kedekatan dengan jenis-jenis yang ada di wilayah lainnya (bahkan di Malaysia dan Thailand). Sebagai bangsa serumpun (Melayu), sebenarnya Indonesia dan Malaysia sendiri sama-sama memiliki tradisi budaya bambu sejak silam. Togunggak, alat musik bambu dari Malaysia, misalnya, memiliki keserupaan dengan angklung yang ada di Indonesia. Ahli etnomusikologi masa kolonial, Jaap Kunst²⁰, justru mengatakan bahwa instrumen angklung pada perkembangannya tersebar di seluruh Jawa, Madura dan Bali, juga sebagian Sumatra dan Kalimantan. Kunst menyiratkan, bahwa tidak tepat menyebut angklung sebagai alat musik bambu milik orang Sunda. Sebab, angklung dilaporkan juga ada di Banyumas, Cirebon, Brebes, Purbalingga, Trenggalek, Tulungagung, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, dan Purbalingga. Alat musik ini telah menyebar secara sporadik di pulau Jawa. Hanya saja karena adanya dan makin tegasnya batas-batas bangsa, suku bangsa, dan batas-batas kedaerahan, maka segala keserumpunan budaya pun menjadi tercerai-berai.

17 Benedict Anderson, *Imagined Communities* (Komunitas-Komunitas Terbayang), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

18 Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Benteng, 2005), hlm. 261.

19 Jacqueline M. Piper, *Bamboo and Rattan; Traditional and Beliefs*, (Singapore: Oxford University Press, 1992), hlm. 1.

20 Jaap Kunst, *Music in Java; its History, its Theory and its Technique* (vol. I & II), (The Hague: Martinus Nijhoff, 1973).

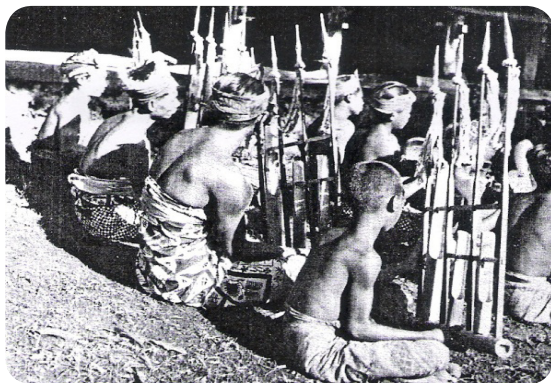
Dalam kasus kebudayaan seperti diulas di atas, maka sebenarnya STA bermaksud menyadarkan bahwa kesadaran identitas kebudayaan seperti itu seharusnya disadari sebagai serangkaian hasil dari konstruksi yang dibuat oleh para ahli atau sarjana masa kolonial yang notabenenya dianggapnya mewakili kebudayaan Barat. Mungkin terdengar mencengangkan, tapi STA menyajikan contoh bukti, bahwa yang pertama kali merekonstruksi reruntuhan Borobudur dan Prambanan bukanlah orang-orang Indonesia, melainkan para sarjana dari *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala) Hindia Belanda.²¹ Hal itu pun sama halnya dengan kasus kesenian. Jika pada masa sekarang, seni

lebih banyak ditekankan sebagai hiburan dan pertunjukkan belaka, namun, pada masa silam (bahkan masih ada masyarakat adat yang mempertahankannya hingga kini), fungsinya lebih ditekankan sebagai sarana sakral atau dalam relung religi saja. Dalam hal ini, Kunst menunjukkan bukti bahwa perkembangan alat musik dengan fungsi sakralnya itu sudah berlangsung sejak masa Hindu. Hal itu ditunjukkannya melalui pahatan-pahatan di relief candi di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menunjukkan berbagai wujud alat musik seperti kecapi, suling, dan rebab yang dimainkan untuk tujuan ritual tertentu.²²

Gambar



Fragmen alat musik di Candi Borobudur [kiri]
dan Candi Penataran [kanan] (sumber foto: dokumentasi pribadi)



Angklung sebagai alat musik ritual di Bali pada 1937
(sumber foto: Colin McPhee, “Angkloeng Gamelan in Bali” dalam *Djawa*, 17 Jrg no. 17, 1937)

²¹ Alisjahbana, *op.cit.*, hlm. 16.

²² Dikutip dari Wim van Zanten, *Sundanese Music in the Cianjuran Style; Anthropological and Musicological Aspects of Tembang Sunda*. (Dordrecht: Foris, 1989), hlm. 81.

Seiring makin banyaknya orang Eropa datang dan menanamkan pengaruh budayanya pada awal abad ke-20, maka alat-alat musik yang oleh orang-orang Pribumi dianggap sakral dan tabu untuk dimainkan di luar momen ritual, oleh seniman Eropa seperti Kunst akhirnya diubah. Berbagai nada Barat pun disesuaikan untuk dimainkan dalam alat-alat musik bambu. Ketika mendengar nada-nada yang cantik dan begitu beraturan iramanya, seorang seniman Pribumi, Radén Machjar Angga Koesoemadinata (seorang guru dari Sumedang) mengembangkan "alat-alat musik rakyat" dengan nada-nada Barat. Harmonisasi antara "alat musik Timur" dan "nada-nada Barat" ini dimainkan untuk berbagai kegiatan, seperti seni paduan suaradi gereja dan sekolah.²³

Harmonisasi semacam itulah yang sepertinya diharapkan oleh STA dan sedianya juga dapat masuk ke dalam jiwa kebudayaan bangsa Indonesia. Namun, dalam pandangan STA, yang dominan dalam mewujudkan harmonisasi itu bukanlah Timur, melainkan Barat. Dalam pikirannya, konsep kesenian baik sebagai seni pertunjukan, ilmu, maupun estetika mula-mula diperkenalkan oleh para ahli seni Barat. Semua yang dibawa, diperkenalkan, serta ditanamkan oleh Barat itu adalah suatu perkembangan yang sangat berbeda dari keadaan pada masa *prae-Indonesia*. Tanpa banyak disadari, bahwa apa yang dibawa, diperkenalkan, serta ditanamkan oleh Barat pada masa lalu, pada masa sekarang telah menyatu sebagai bagian dari nilai-nilai ke-Indonesia-an. Pada kenyataannya memang tidak banyak orang Indonesia yang menyadari konstruksi sejarah dari pengaruh Barat dalam kebudayaannya sendiri. Bahkan, pengaruh Barat itu telah dipurifikasi seolah-olah budaya murni warisan leluhur alias tidak terpengaruhi budaya asing. Ketidak-sadaran seperti ini dikhawatirkan oleh STA hanya akan membuat Timur berada dalam sifatnya yang statis (*statisch*). Jika sifat ini bersekam, segala sifat seperti etnonasionalisme sempit, feodalisme,

serta kepercayaan terhadap mitos dan takhyul mungkin akan terus mendarah-daging dalam jiwa kebudayaan bangsa Indonesia.

Di samping semua ketidak-sadaran itu memiliki sifat yang mengkhawatirkan, STA dibuat kecewa dengan begitu mudahnya bangsa Indonesia dibuai dengan pencitraan bahwa Timur bersifat halus budinya, adapun Barat dicitrakan dengan *egoistisch*, *materialistisch*, dan *intellectualistisch* (sic.).²⁴ Kekecewaannya itu tampaknya beralasan karena ia berpikir, bahwa di balik segala sifatnya yang "halus budi" itu terkandung sifat-sifat negatif yang menurutnya tidak akan dapat membawa Indonesia "menuju masyarakat dan kebudayaan baru", sebagaimana ia harapkan.

III. DI BALIK KONSTRUKSI PEMIKIRAN "KEBARATAN" STA

Sanusi Pane adalah salah seorang penanggap yang tidak sejalan dengan cara berpikir STA. Selain mengesankan pemikiran STA terlalu "kebaratan", Pane pun menampik tuduhan tokoh Pujangga Baru itu yang terlalu gegabah menuding dirinya sebagai pemuja Timur lebih tinggi daripada Barat.²⁵ Saling kritik pun terus berlangsung. Namun, berbagai kritik malah tidak menyurutkan STA dalam menuliskan pemikirannya lebih tegas lagi. Hal itu terbaca dalam tulisannya "Semboyan yang Tegas" yang dimuat dalam *Pujangga Baru* pada Oktober 1935. Dikatakan oleh STA: "Otak Indonesia harus diasah menyamai otak Barat! Individu harus dihidupkan sehidup-hidupnya!"²⁶

Pemikiran STA yang dapat dikatakan ekstrem untuk ukuran masa itu dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun, jika ditelisik secara filsafat, sebagai juga seorang eksponen gerakan sastra baru pada 1930-an yang menggunakan nama Pujangga Baru, STA pun berusaha memantulkan pemikirannya itu dalam karya-karya sastranya, mulai dari *Layar*

23 Kusumadinata, R.M. 1951. "Dapatkah DA-MI-NA-TI-LA digantikan oleh DO-RE-MI-FA-SO-LA-TI atau C-D-E-F-G-A-B?" dalam Budaja, No. 28, (1951), hlm. 27 – 29. Lihat juga Jaap Kunst, *De Inheemse muziek en de zending*, (Amsterdam: Uitgeverij H.J. Paris, 1947).

24 Alisjahbana, *op.cit.*, hlm. 19.

25 Sanusi Pane, "Catatan", dalam Achdiat K. Mihadja, *Polemik Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1977), hlm. 30.

26 Sutan Takdir Alisjahbana, "Semboyan yang Tegas", dalam Achdiat K. Mihadja, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1977), hlm. 42.

Terkembang (1936) sebagai karya awal hingga karya drama *Kebangkitan* (1984). Melalui dua tokoh ciptaannya dalam *Layar Terkembang*, STA begitu jelas menghadirkan pertentangan antara Tuti yang disifati berpaham rasionalisme atau kebarat-baratan (berpikiran maju serta berjiwa bebas) layaknya mentalitas Barat dengan Maria yang berkarakter lebih ketimur-timuran (kebalikan dari sifat Tuti).²⁷ Menurut Kuntowijoyo²⁸, melalui karya-karyanya seperti terpantul dalam *Layar Terkembang* itu, STA dengan sadar berusaha menunjukkan suatu cita-cita kelas menengah menuju masyarakat baru. Berbagai paham borjuasi Eropa seperti realisme, rasionalisme, dan cita-cita kemajuan begitu dihayati dalam pemikirannya. Sebenarnya Polemik Kebudayaan yang dipantik tulisan STA sendiri adalah polemik antara kelas menengah. Apa yang dipolemikkan kelas ini adalah persoalan-persoalan kebudayaan antara Barat dan Timur atau antara baru dan lama. Cermin atas hal itu dapat dilihat dari pertentangan antara pemikiran STA dan Ki Hajar Dewantara yang menunjukkan kesan bahwa STA adalah pewaris pemikiran *Renaissance* dan Pencerahan (*Aufklärung*) Eropa.

Pemikiran Eropa yang puncaknya berlangsung pada abad ke-18 dan menentukan “kebangkitan” Barat menuju masyarakat dan kebudayaan baru itu begitu dihayati oleh STA untuk dipakai sebagai sarana idealnya dalam membangkitkan Indonesia dengan meniti jalan pemikiran Barat. Hal itu dapat dirasakan sekali dari karya dramanya *Kebangkitan*, yang mana salah satu bagiannya berbunyi sebagai berikut:

”Dalam zaman yang amat gelap itu,
Bangkitlah *Renaissance* membawa harapan cerah,
Membangkitkan percaya manusia akan dirinya,
Mengaji hukum alam dengan akalnya,
Sehingga mungkin dimanfaatkan kekayaan semesta,

Maka terciptalah mesin sebagai hamba sahaya,
Yang gembira gemuruh menderu siang dan malam,
Berlipat ganda menggantikan tenaga dan terampil,
Manusia dan hewan, tak kenal letih dan lelah,
Menghasilkan serbaragam keperluan”²⁹

Sepintas kutipan dari drama itu menyiratkan betapa STA memuja *Renaissance* Eropa sebagai kiblat yang patut diikuti demi kemaslahatan budaya di Indonesia. Segala kemajuan yang dihasilkan melalui *common sense* menghasilkan keragaman manfaat bagi manusia. Teknologi modern tersirat merupakan pelaju penting bagi kemajuan hidup umat manusia yang juga patut diterapkan di Indonesia. Lalu, bagaimana STA mendudukkan nilai tradisi dan budaya Timur dalam menghadapi nilai tradisi dan budaya Barat yang diidealkannya itu? Apakah artinya budaya Timur benar-benar seperti dikatakan oleh Pane hanya diposisikan sebagai inferior oleh STA?

Ternyata, dalam pandangan STA, banyak para penanggapnya yang salah memahami pemikirannya. Dalam sebuah wawancara dengan Majalah *Prisma* pada 1976, STA mengatakan bahwa ia sering dituduh menyamaratakan modernisasi dengan westernisasi. STA menampik bahwa ia bukanlah pemuja Barat; pun menegaskan bahwa ia tidak sedang membicarakan Barat. Namun, ia tengah membahas persoalan mentalitas.³⁰ Dalam hal kebudayaan di Indonesia, dengan menafsirkan pemikiran STA, maka persoalan mentalitas berupa feodalisme hanya bisa dikikis dengan budaya intelektual, materi, dan ego. STA menekankan bahwa ketika ia berbicara tentang Barat, maka yang dimaksudkannya adalah manusia yang berpikir, mengambil keputusan, dan memegang nasib di tangannya sendiri.³¹ Pemikiran STA ini ternyata lahir dan bertumbuh-kembang karena reaksi berbagai pihak dari kalangan kaum terdidik Indonesia terhadap tulisannya mengenai Kongres Pendidikan

27 Sutan Takdir Alisjahbana, *Layar Terkembang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1962).

28 Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), hlm. 147.

29 Sutan Takdir Alisjahbana, *Kebangkitan: suatu Drama Mitos tentang Bangkitnya Dunia Baru*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1984), hlm. 20 – 21.

30 Sutan Takdir Alisjahbana, “Cendekiawan dan Pembaharuan”, dalam *Prisma*, “Dialog: Serba Pandangan tentang Peranan Cendekiawan”, No. 11, (November, 1976), hlm. 41.

31 *Ibid.*

di Solo pada 1930-an. Kaum terdidik itu menyerang semua sistem pendidikan Barat yang mereka katakan terlalu intelektualistik, materialistik, dan egoistik. Menariknya, para pengkritiknya itu adalah juga para penerima pendidikan Barat. Bagi STA mereka telah keliru dalam melihat duduk persoalan yang tengah dipikirkan dan dibicarakannya. Para pengkritiknya itu tidak lebih memandang Barat hanya secara lahiriah saja, tapi tidak menyerap nilai-nilai batiniahnya yang oleh STA disifati dengan dinamis, berpikir ke masa depan, dan bermental intelektual, materialis, dan egois (yang tentu dalam arti positifnya).

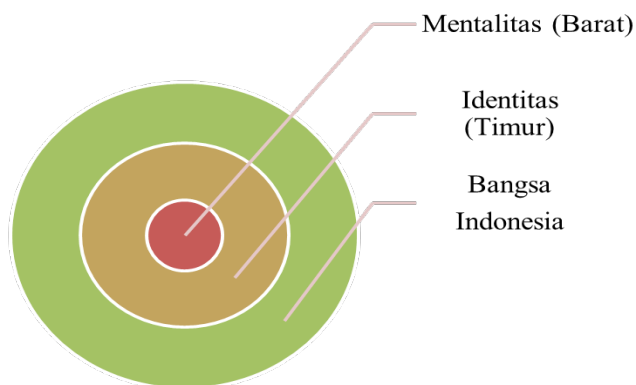
Menilik permasalahan seputar perdebatan relasi Barat dan Timur pada dasawarsa 1930-an yang ditanggapi oleh STA, kiranya dapat diambil saripati makna di balik pemikiran sosok pemikir ini. STA menyelami Barat lebih pada substansi alam pikiran yang mengusung intelektualisme dan ia idealkan agar sejatinya diserap sebagai inti dari pembentukan mental bangsa. Pewacanaan perlunya intelektualisme di dunia Timur artinya telah bergulir di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan. Intelektualisme yang diurgensikan oleh STA pun terus bergulir wacananya setelah era kemerdekaan. Hal itu misalnya dapat dibuktikan dari kalimat pernyataan dalam tajuk rencana majalah *Basis* tahun 1967 “Orang Timur butuh Intelektualisme” yang dikutip sebagai berikut:

“Djika orang Barat dengan ilmu dan tehniknja membutuhkan perasaan, maka orang Timur pada hemat kami membutuhkan intelektualisme. Ketakutan jang berlebih-lebihan terhadap intelektualisme akan membawa kita kepada emosionalisme dan verbalisme. Emosionalisme ternjata terdapat dalam dunia politik kita dan pergaulan antar agama. Verbalisme ternjata terdapat diseluruh dunia peladjaran kita.”³²

Kutipan di atas menunjukkan adanya kesinkronan makna dengan pemikiran STA terkait bagaimana membangun relasi antara Timur dan Barat. Berpikir secara intelektual merupakan cerminan dari mentalitas Barat yang sedianya dijadikan ruh bagi bangsa Indonesia untuk membangun identitas

kebangsaannya. Hubungan antara mentalitas, identitas, dan kebangsaan yang dijamin dari keharmonisan Timur dan Barat sebagaimana diidealkan STA kiranya dapat disederhanakan melalui skema berikut ini:

Skema Pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana



Pemikiran STA sendiri sebenarnya bukanlah satu-satunya atau yang pertama mengemuka di Indonesia. Sebelum itu, pada 1926, Tan Malaka dalam bukunya *Massa Actie* (Aksi Massa) sudah lebih dahulu menyuarakan:

“Akuilah dengan putih bersih, bahwa kamu sanggup dan mesti belajar dari orang Barat. Tapi kamu jangan jadi peniru orang Barat, melainkan seorang murid dari Timur yang cerdas, suka memenuhi kemauan alam dan seterusnya dapat melebihi kepintaran guru-gurunya di Barat.”³³

Pemikiran Tan Malaka ini pantas dianggap sebagai penjelas pemikiran STA. Dengan merefleksikan pemikiran Tan Malaka, dapat dikatakan bahwa para pengkritik STA seperti memang tidak memahami akar pemikiran STA dalam membahas hubungan antara budaya Barat dan Timur. Pokoknya jelas, ini soal mengambil mana yang baik dan tidak meniru yang tidak baik dari Barat. Baik pemikiran Tan Malaka maupun STA, dinamisme dalam peradaban Barat, sejatinya diikuti mentalnya oleh bangsa Indonesia. Ini tampaknya sejalan dengan contoh yang diterapkan oleh bangsa Jepang pada masa Kekaisaran Meiji. Melalui kebijakan Restorasi

³² Redaksi *Basis*, “Orang Timur Butuh Intelektualisme”, *Basis*, No. XVII, Oktober 1967.

³³ Tan Malaka, *Massa Aksi*, (Bandung: Segi Arsy, 2010).

Meiji sejak 1868 hingga 1912, kaisar bertekad untuk mengubah struktur politik dan sosial Jepang dari yang semula tertutup terhadap nilai-nilai tradisi menjadi terbuka terhadap modernisasi yang diserap dari pengaruh-pengaruh Barat. Selain tumbuh menjadi kekuatan militer yang disegani pada awal abad ke-20, bangsa Jepang juga berkembang menjadi negara industri maju bersaing ketat dengan negara-negara Barat. Berbagai aspek kehidupan di Jepang, mulai dari pemerintahan, pendidikan, media massa, dan bisnis dibawa pada arah dan wujud modern. Dalam hal pendidikan, pemerintah Jepang memperkenalkan sistem pendidikan nasional untuk mendidik seluruh penduduknya. Pada akhir kekuasaan Meiji, hampir seluruh penduduk telah mengecap pendidikan umum gratis.³⁴

Dalam proses menuju modernisasinya itu, Jepang banyak menyerap nilai-nilai Barat. Namun, yang diambil olehnya adalah hanya mental untuk maju dan menyingkirkan etos-etos Timur yang dinilai menghambat Jepang ke arah kemajuan. Nilai-nilai feodal yang sebelumnya melekat di kalangan kaum Samurai lantas dikikis oleh pemerintah. Hak-hak istimewa mereka pun dihapuskan. Pemerintah menyatakan semua kelas adalah sama atau sederajat. Para Samurai pun mulai mengikuti arus modern itu dengan mengambil pekerjaan menjadi pebisnis dan pekerja tangguh yang menjunjung tinggi kedisiplinan. Meski mereka juga mengambil nilai-nilai dari Barat, bukan berarti etos ke-Jepang-an mereka turut tergilas. Justru, etos-etos yang mencakup kedisiplinan, kejujuran, sikap pantang menyerah, dan kesetiaan tetap diemban sebagai penegas bahwa mereka adalah bangsa Jepang, bukan sebagai pengekor bangsa Barat.

Apa yang dilakukan oleh bangsa Jepang itu adalah juga pantulan dari keinginan STA untuk menerapkan hal serupa dalam konteks kebudayaan di Indonesia. Tuduhan bahwa ia adalah pemuja Barat, sudah ditanggapi olehnya, bahwa banyak orang –dan khususnya para pengkritiknya– tidak memahami arah pemikirannya.

Memang Jepang dapat dikatakan sebagai sebuah model yang bagus dalam menjalin hubungan ideal antara nilai-nilai tradisi (Timur) dan modernitas (Barat). Mungkin seintas Indonesia pun bisa mengikuti jejaknya. Namun, masalahnya, masih banyak orang Indonesia yang memang belum dan tidak mudah untuk memahami arah pemikiran STA dalam meretas persoalan hubungan budaya Barat dan Timur.

Apa yang dialami dan dikeluhkan STA itu pun pernah pula dialami dan dikeluhkan Sutan Sjahrir,³⁵ tokoh pergerakan nasional Indonesia. Dalam kumpulan surat-menyuratnya pada masa menjalani tahanan politiknya yang kemudian dihimpun ke dalam buku *Renungan dan Perjuangan*, Sjahrir pernah berkata:

”Kita begitu sering saling tidak mengerti, aku dan bangsaku ini. Bagi mereka aku kadang-kadang terlalu abstrak, terlalu ”kebarat-baratan”, di luar jangkauan pengertian mereka. Dan mereka bagiku kadang-kadang terlalu lamban, membuat aku berputus asa karena keengganan dan kesalahan pengertian mereka... Akan tetapi nasib mereka dan tujuan hidupku adalah satu; kami senasib sepenanggungan dari dulu hingga sekarang... Sekarang hanya tinggal rasa setiakawan dan rasa senasib dan sepenanggungan dengan bangsaku yang sengsara ini.”

Sjahrir yang juga banyak menghayati filsafat di balik kemajuan budaya Barat, punya masalah hampir serupa dengan STA. Pemikiran keduanya ternyata sama-sama tidak dimengerti oleh saudara sebangsanya sendiri. Sjahrir bahkan seakan mengasihani cara banyak orang Indonesia yang salah dalam memahami dan memaknai hubungan ideal antara Barat dan Timur atau antara yang tradisional dan modern. Sepertinya ia dapat merasakan pula seperti dirasakan STA bahwa salah paham dan salah makna itu dapat memengaruhi orang Indonesia dalam memikirkan masalah kebudayaannya sendiri. Jelas sekali para pengkritiknya itu tidak melihat secara saksama, bahwa yang ditiru oleh STA, Sjahrir, dan juga Tan Malaka bukanlah kemewahan gaya hidup Barat seperti berpesta dan berdansa. Mereka justru

³⁴ Alistair D. Swale, *The Meiji Restoration: Monarchism, Mass Communication and Conservative Revolution*, (New York: Pilgrave MacMillan, 2009).

³⁵ Sutan Sjahrir, *Renungan dan Perjuangan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), hlm. 40.

lebih memilih jalan untuk menghayati sikap dan cara berpikir kritis, cendekia, dan berpikir menatap masa depan seperti halnya diterapkan pada masa Renaissance di Barat (dan juga ditiru mentalnya oleh bangsa Jepang). Penghayatan ketiganya itu adalah kebalikan dari sikap dan pikiran banyak orang Indonesia yang masih dibaluti oleh nilai-nilai mitos, sehingga karena hal inilah sifat untuk berpikir kritis menjadi tumpul dan akhirnya cenderung suka mengidam-idamkan kejayaan budaya masa lalu (seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Pajajaran).

Dalam hal ini, pemikiran STA –seperti halnya juga Tan Malaka dan Sjahrir– tetap patut dan layak direnungi kapanpun sebagai pandangan dan sikap bangsa Indonesia dalam menilai, menghadapi, dan terlibat dalam hubungan dengan kebudayaan Barat atau lebih luas dari itu: hubungan dalam batas-batas nasional dan internasional. Hal yang harus dihindarkan adalah tidak terjerembab dalam kebanalan merajut hubungan budaya Barat dan Timur serta punya keteguhan prinsip sendiri (seperti halnya dilakukan Jepang) dalam menghadapi benturan peradaban antarkedua kutub budaya tersebut.

Hubungan ideal antara Barat dan Timur memang menjadi salah satu pokok pemikiran STA –seperti halnya Tan Malaka dan Sjahrir– yang gelisah dengan tabiat dan sikap orang Indonesia yang pada satu sisi mencoba mengagungkan budayanya sendiri, tapi pada sisi lain tanpa disadarinya malah terendahkan oleh hegemoni nilai-nilai Barat. Pada perkembangan budaya di Indonesia saat ini, semua itu terlihat jelas dari kebanalan dalam menyikapi budaya sendiri, dan kegenitan berlebihan dalam menyerap budaya Barat seperti terlihat dalam fenomena berbahasa, pendidikan, dan gaya hidup yang serba kebaratan. Padahal kegenitan seperti ini adalah yang dikhawatirkan oleh STA. Mental berpikir dan berkepribadian untuk maju, bebas, dan mengedepankan rasio yang diusung Barat malah sama sekali tidak diserap. Hal itu terlihat dari kecenderungan terpenjaranya mental budaya Indonesia pada satu sisi dalam kekolotan alam

pikiran Timur yang masih diselimuti mitos, dan pada sisi lain menolak dengan tegas segala hal pemikiran berbau Barat sebagai yang acap dinilainya sesat dan menyesatkan. Wajar saja jika seorang sejarawan ahli Indonesia, Robert E. Elson³⁶, mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Barat cenderung bersifat ambivalen dan acapkali penuh kesalahpahaman. Semua itu nyatanya hingga sekarang masih menggelayuti masalah kebudayaan di Indonesia dalam berbagai wujud barunya, tapi, esensinya tidak banyak berubah jika merefleksikan kembali secara mendalam pemikiran STA.

IV. PENUTUP

Dengan segala kemajemukan masalah budaya di Indonesia, dari hasilrefleksi terhadap pemikiran STA dalam artikel ini setidaknya terjelaskan bahwa kemajemukan itu merupakan katalis bagi keambivalenan dan kesalahpahaman memahami hubungan antara Timur dan Barat. Baik Timur maupun Barat sendiri merupakan politik identitas yang mana keduanya perlu dipahami sebagai suatu konstruksi historis. Namun, bagi STA yang diperlukan adalah memikirkan secara reflektif mana bagian yang baik untuk diambil dari Barat dan kemudian diresapkan ke dalam mental kebudayaan bangsa Indonesia. Jika hal ini berhasil dipraktikkan, bukan mustahil setiap individu bangsa mampu untuk memfilter mana bagian yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat dari Barat untuk diserap atau tidak kedalam kepribadian budaya bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu perlu didukung strategi berupa pendidikan nasional yang sejatinya menanamkan karakter kebudayaan dengan strategi seperti dijalankan Jepang.

Terlepas bangsa seperti Jepang bisa menerapkan strategi kebudayaannya hingga berhasil menjadi bangsa berkarakter maju dan modern, tentu untuk konteks Indonesia memerlukan strategi tersendiri. Dengan menggugah kembali pemikiran STA sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, bukan

36 R.E. Elson, "Indonesia and the West: an Ambivalent, Missunderstood Engagement", dalam *Australian Journal of Politics and History* (Vol 52 No. 2, 2006).

mustahil keambivalenan antara Timur dan Barat serta kesalah-pahaman Timur terhadap Barat yang selama ini menggelayuti pikiran bisa teratasi dalam upaya mewujudkan karakter bangsa Indonesia yang maju.

Berbagai masalah terkait fanatisme suku, agama, ras, dan bangsa kerap menghiasi perjalanan sejarah Indonesia. Dari masalah ini seringkali menunjukkan kesan bahwa banyak masyarakat yang lebih mengedepankan aspek emosi daripada rasionya. Kesan selama ini yang melekat dalam pikiran bahwa bangsa Timur kerap lebih mengedepankan aspek emosinya dan bangsa Barat lebih mengedepankan rasionya seolah-olah dianggap sebagai kenyataan

universal. Akan tetapi, jika merenungkan pemikiran STA, kesan dikotomik itu justru seharusnya didekonstruksi dari pikiran.

Intelektualisme sebagaimana diidealkan STA hendaknya menjadi wahana dekonstruksi pemikiran yang perlu ditanamkan dalam dunia pendidikan di Indonesia sebagai upaya menguatkan sendi-sendi karakter kebangsaan. Maka dari itu, pemikiran para intelektual bangsa seperti STA perlu diketahui dan dihayati kembali oleh generasi muda bangsa melalui program-program pendidikan karakter yang dapat mengasah rasio mereka agar dapat berpikiran maju untuk menyongsong masa depan bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. M. (1963). *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sedjarah Asia Tenggara*. Jakarta: Bhratara.
- Alisjahbana, S. T. (1962). *Layar Berkembang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. (1976). Cendekiawan dan Pembaharuan. *Prisma*, “Dialog: Serba Pandangan tentang Peranan Cendekiawan”, No. 11, November 1976, hlm. 40 – 42.
- _____. (1977). Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru. Achdiat K. Mihadja, *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- _____. (1977). Semboyan yang Tegas. Achdiat K. Mihadja. *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- _____. (1984). *Kebangkitan: suatu Drama Mitos tentang Bangkitnya Dunia Baru*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Anderson, B. (2002). *Imagined Communities* (Komunitas-Komunitas Terbayang). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barker, C. (2005). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang.
- Clark, M. (2013). The Politics of Heritage: Indonesia – Malaysia Cultural Contestations. *Indonesia and the Malay World*, Vol. 41No. 121, hlm. 396 – 417.
- Elson, R.E. (2006). Indonesia and the West: an Ambivalent, Missunderstood Engagement. *Australian Journal of Politics and History* Vol 52 No. 2, hlm. 261-271.
- Hanafi, H. (2000). *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat* (terj. M. Najib Buchori). Jakarta: Paramadina.
- Kasiyan, K. (2017). Questioning Western Character Hegemony in Indonesian Aesthetics Books. Endah Retnowati et.al, *Character Education for 21st Century Global Citizens*, Proceedings of the 2nd International Conference on Teacher Education and Professional Development (Incotepd 2017), 21–22 Oktober 2017, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kunst, J. (1947). *De Inheemse muziek en de zending*. Amsterdam: Uitgeverij H.J. Paris.
- _____. (1973). *Music in Java; its History, its Theory and its Technique* (vol. I & II). The Hague: Martinus Nijhoff.
- Kuntowijoyo. (1987). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusumadinata, R.M. (1951). Dapatkah DA-MI-NA-TI-LA digantikan oleh DO-RE-MI-FA-SO-LA-TI atau C-D-E-F-G-A-B? *Budaja*, No. 28, (1951).

- Lubis, M. (2012). *Manusia Indonesia*. Jakarta: Obor.
- McPhee, C. (1937). Angkloeng Gamelan in Bali. *Djawa*, 17 Jrg no. 17 (1937).
- Munsi, A. D. (2005). *Bahasa Menunjukkan Bangsa*. Jakarta: KPG.
- Nairn, T., (1994). The Maladies of Development. Hutchinson & Smith (eds.). *Nationalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Naisbitt, J. (1994). *The Global Paradox*. New York: Warner Books.
- Pane, S. (1977). Catatan. Achdiat K. Miharja, *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Piper, J. M. (1992). *Bamboo and Rattan; Traditional and Beliefs*. Singapore: Oxford University Press.
- Purwanto, B. (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?! Yogyakarta*: Ombak.
- Redaksi *Basis*. (1967). Orang Timur Butuh Intelektualisme. *Basis*, No. XVII, Oktober 1967.
- Said, E. (1977). *Orientalism*. London: Penguin.
- Sjahrir, S. (1990). *Renungan dan Perjuangan*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Soedjatmoko. (1970). The Intellectual in Developing Nation. Soedjatmoko, 2010. *Menjadi Bangsa Terdidik Menurut Soedjatmoko* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Swale, A. D, (2009). *The Meiji Restoration: Monarchism, Mass Communication and Conservative Revolution*. New York: Pilgrave MacMillan.
- Malaka, T. (2010). *Massa Aksi*. Bandung: Segi Arsy.
- Yamin, M. (1951). *6000 Tahun Sang Merah Putih*. Jakarta: Siguntang.
- van Zanten, W. (1989). *Sundanese Music in the Cianjuran Style; Anthropological and Musicological Aspects of Tembang Sunda*. Dordrecht: Foris.